

**LAPORAN PROJECT BASED TRAINING
DATA ANALYTIC FOR AUDIT
BATCH II**

**HUBUNGAN PENUGASAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PERWAKILAN BPKP
TERHADAP INTEGRITAS PEMERINTAH DAERAH MELALUI SURVEY
PENILAIAN INTEGRITAS KPK
TAHUN 2021**

**Oleh
YOGI HARDIKA
DIKLAT ANALYTIC FOR AUDIT BATCH II KELAS A**

BAB I

DATA UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Latar Belakang Pemilihan Variabel Penelitian

Upaya mewujudkan pemerintahan bersih terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu sumber persoalan yang diidentifikasi menghambat upaya ini adalah rendahnya integritas birokrasi, yang bisa menyebabkan pelayanan publik tidak transparan, tidak akuntabel, dan berpotensi korupsi. Pada dasarnya, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) telah menginisiasi upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Namun, capaian upaya-upaya tersebut belum memiliki ukuran yang objektif. Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menjawab kebutuhan akan perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan K/L/PD. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengembangkan kegiatan ini sejak tahun 2016.

Selain SPI, KPK juga mengembangkan aplikasi monitoring system pencegahan korupsi melalui program Monitoring Centre of Prevention (MCP). Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya. Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 2) Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
- 3) Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
- 4) Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang

bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dibagi ke dalam 8 tahapan yaitu :

- 1) Perencanaan dan Penganggaran APBD
- 2) Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) Perizinan
- 4) APIP
- 5) Manajemen ASN
- 6) Optimalisasi Pajak Daerah
- 7) Manajemen Aset Daerah
- 8) Tata Kelola Dana Desa

Deputi Bidang Investigasi BPKP selama tahun 2021 melalui Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia telah melaksanakan penugasan represif yaitu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan. Penugasan ini secara tidak langsung diharapkan dapat menjadi *warning* bagi Pemerintah Daerah untuk dapat memperbaiki sistem tata Kelola pemerintahannya sehingga kasus-kasus korupsi yang dapat merugikan keuangan negara tidak terjadi Kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melihat hubungan antara penugasan represif yang dilakukan oleh perwakilan BPKP di seluruh Indonesia terhadap integritas pemerintah daerah dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Penugasan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli, dan Skor MCP yang dilaksanakan KPK terhadap Integritas pada Pemerintah Provinsi Tahun 2021.

B. Sumber Data Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016 :68). Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel yang akan diteliti yaitu jumlah penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, jumlah penugasan Pemberian Keterangan Ahli, dan Skor Program MCP yang dilaksanakan KPK sebagai variabel independen dan skor integritas pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Tahun pengujian adalah tahun 2021. Data pengujian ini diambil dari web www.jaga.id yang dikelola KPK dan data SIMA Perwakilan BPKP Tahun 2021.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut, juga semakin baik. Data diperoleh melalui kuesioner elektronik SPI yang diisi secara self-administered (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner; melalui elektronik (whatsapp blast dan e-mail blast), maupun melalui tatap muka secara Computer Assisted Personal Interview (CAPI) di gadget enumerator.

Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan aplikasi dashboard KPK dalam upaya pencegahan korupsi dengan fokus perbaikan tata Kelola pemerintahan daerah yang meliputi delapan daerah intervensi seperti yang dijelaskan pada Poin 1. Delapan area intervensi ini merupakan hasil identifikasi KPK atas titik rawan korupsi. Setiap area intervensi tersebut kemudian diturunkan ke dalam serangkaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang implementasi dan kemajuannya dievaluasi KPK secara berkala. Tujuannya untuk mengurangi risiko dan dapat menutup celah potensi korupsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Penugasan represif adalah penugasan yang dilakukan perwakilan BPKP dalam rangka menindaklanjuti kejadian Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Daerah guna menimbulkan efek jera atas perbuatannya tersebut.

Data penugasan represif yang dilakukan oleh perwakilan BPKP seluruh Indonesia diambil dari Surat Tugas yang diterbitkan oleh setiap Kepala Perwakilan BPKP seluruh Indonesia untuk pelaksanaan tugas di Bidang Investigasi Tahun 2021. Data ini terdiri dari data Surat Tugas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli.

BAB II KEGIATAN ANALISIS DATA

A. Kegiatan Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan atas hipotesis bahwa penugasan represif yang dilakukan oleh perwakilan BPKP yaitu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli serta Penilaian upaya perbaikan tata Kelola pemerintahan yang dilakukan oleh KPK melalui program MCP meningkatkan skor penilaian integritas pada pemerintah daerah Tahun 2021.

B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

1. Hipotesis

H_0 : Pelaksanaan penugasan perhitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, dan program MCP tidak mempengaruhi integritas pemerintah daerah

H_1 : Pelaksanaan penugasan perhitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, dan program MCP mempengaruhi integritas pemerintah daerah

α : 0,05

H_0 diterima jika nilai *Sig. (2-tailed)* > α

H_0 ditolak jika nilai *Sig. (2-tailed)* < α

2. Analisis

a) Analisis Statistik Deskriptif

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
PKKN	Mean	10,6176	,87143	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	8,8447	
		Upper Bound	12,3906	
	5% Trimmed Mean	10,4444		
	Median	9,5000		
	Variance	25,819		
	Std. Deviation	5,08125		
	Minimum	1,00		
	Maximum	25,00		
	Range	24,00		
	Interquartile Range	6,25		
	Skewness	,727	,403	
	Kurtosis	,976	,788	
	AHLI	Mean	24,4706	2,15042

	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	20,0955	
		Upper Bound	28,8457	
	5% Trimmed Mean		23,8007	
	Median		23,5000	
	Variance		157,226	
	Std. Deviation		12,53899	
	Minimum		6,00	
	Maximum		55,00	
	Range		49,00	
	Interquartile Range		16,75	
	Skewness		,748	,403
	Kurtosis		,369	,788
MCP	Mean		83,0882	2,06506
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	78,8868	
		Upper Bound	87,2896	
	5% Trimmed Mean		84,0980	
	Median		84,5000	
	Variance		144,992	
	Std. Deviation		12,04126	
	Minimum		49,00	
	Maximum		99,00	
	Range		50,00	
	Interquartile Range		13,50	
	Skewness		-1,384	,403
	Kurtosis		1,686	,788
SPI	Mean		69,3409	1,14047
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	67,0206	
		Upper Bound	71,6612	
	5% Trimmed Mean		69,5537	
	Median		70,2100	
	Variance		44,222	
	Std. Deviation		6,65000	
	Minimum		49,13	
	Maximum		82,81	
	Range		33,68	
	Interquartile Range		6,13	
	Skewness		-,657	,403
	Kurtosis		1,669	,788

b) Hasil Pengujian Asumsi Klasik
- Uji Normalitas

Tests of Normality

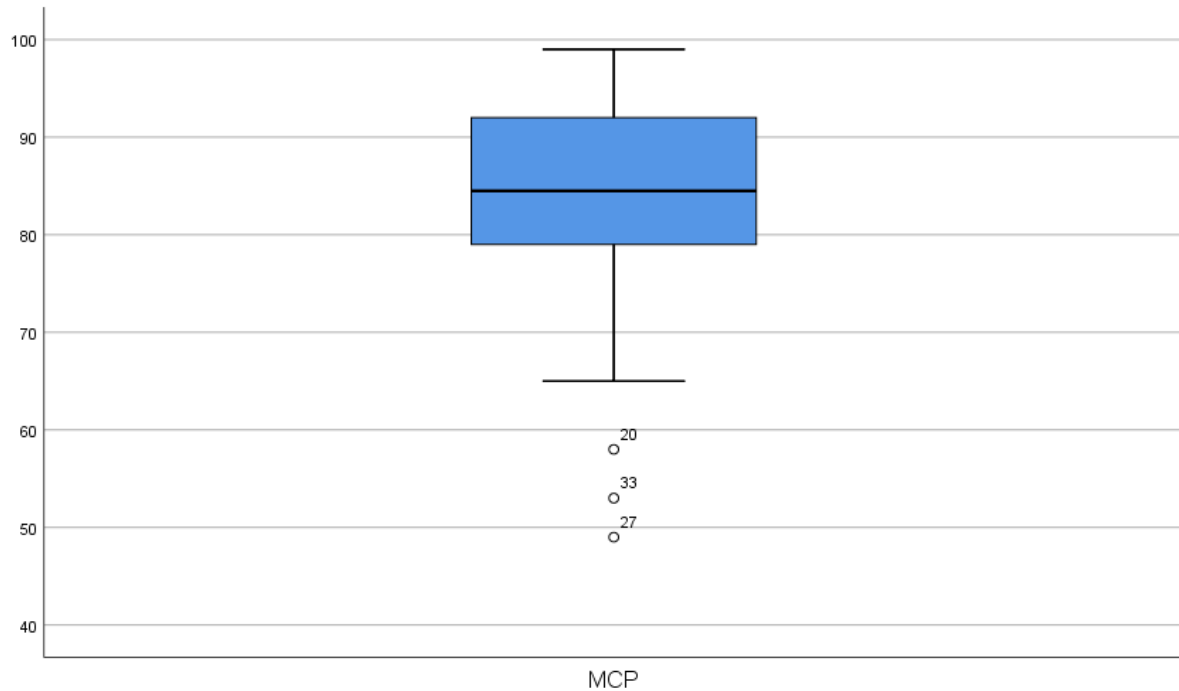
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PKKN	,137	34	,109	,957	34	,199
AHLI	,094	34	,200*	,942	34	,071
MCP	,166	34	,018	,863	34	,001
SPI	,106	34	,200*	,962	34	,275

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Uji normalitas yang digunakan adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dari table di atas nilai Sig. untuk variable MCP berada dibawah $\alpha = 0,05$ yang berarti distribusi untuk variable tersebut tidak normal.

Peneliti kemudian melihat diagram observed value untuk variable MCP seperti di bawah dan kemudian memutuskan untuk mengeluarkan sampel outlier yakni nomor 20, 33, dan 27 yang nilainya berada di ekstrem bawah.



Sehingga setelah ketiga sampel dikeluarkan, nilai uji Kolmogorov-smirnov disimpulkan sudah berdistribusi normal menjadi seperti berikut:

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PKKN	,157	31	,050	,948	31	,137
AHLI	,104	31	,200*	,932	31	,051
MCP	,149	31	,079	,946	31	,119
SPI	,104	31	,200*	,955	31	,210

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

- Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variable independent. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variable independent.

Uji multikolinearitas yang digunakan adalah metode tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor)

Coefficients^a

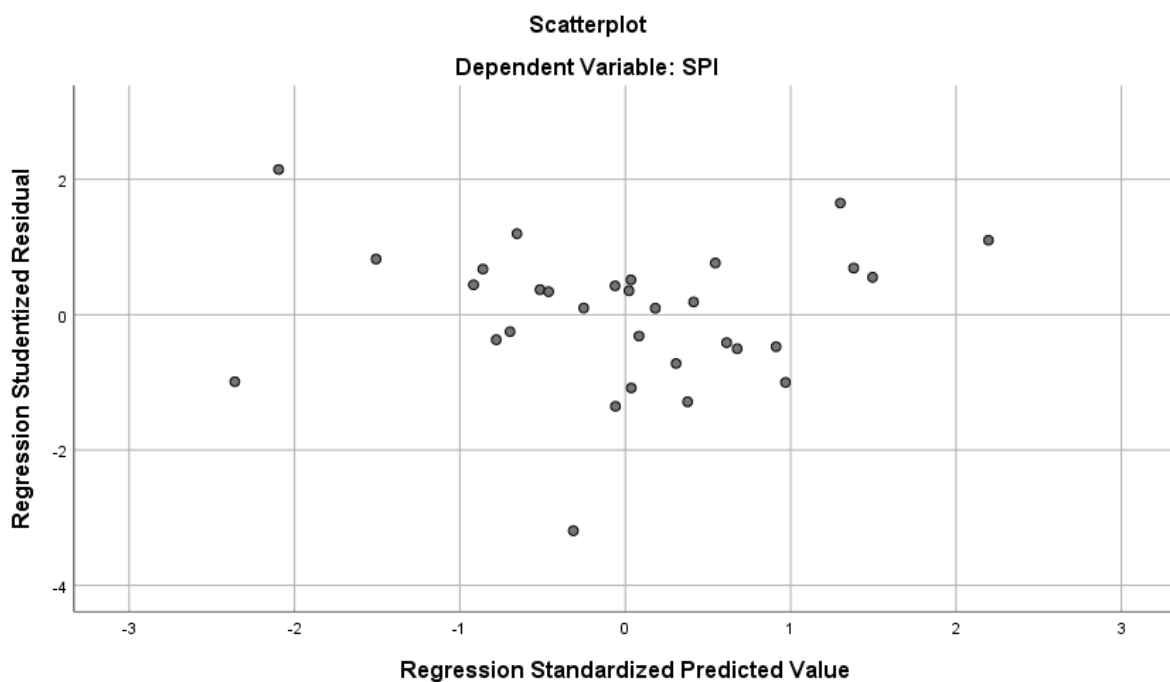
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PKKN	,318	3,143
	AHLI	,299	3,340
	MCP	,808	1,237

a. Dependent Variable: SPI

Berdasarkan table uji multikolinearitas di atas, nilai tolerance masing-masing variable independent lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variable dependen lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variable dependen.

- Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. bisa dilihat bahwa pada scater plot dot menyebar dan tidak teratur maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas



c) Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan adalah dengan uji F. hasil uji F untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	199,568	3	66,523	1,570	,220 ^b
	Residual	1143,960	27	42,369		
	Total	1343,528	30			

a. Dependent Variable: SPI

b. Predictors: (Constant), MCP, PKKN, AHLI

Berdasarkan hasil uji di atas, nilai Sig. adalah sebesar 0,220 yang mana lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga disimpulkan H_0 diterima. Artinya secara bersama-sama penugasan perhitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, program MCP KPK tidak mempengaruhi nilai integritas pemerintah daerah.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	56,533	14,531		3,891	,001		
	PKKN	-,559	,401	-,440	-1,396	,174	,318	3,143
	AHLI	,188	,173	,354	1,092	,285	,299	3,340
	MCP	,168	,169	,196	,992	,330	,808	1,237

a. Dependent Variable: SPI

Sedangkan jika dilihat secara parsial, berdasarkan tabel di atas diketahui sebagai berikut

- Penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (X1) menghasilkan nilai t hitung sebesar $-1,396 < 1,70329$ dan nilai signifikansi sebesar $0,174 > 0,05$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (X1) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap integritas pemerintah daerah (Y).
- Penugasan Pemberian Keterangan Ahli (X2) menghasilkan nilai t hitung sebesar $1,092 < 1,70329$ dan nilai signifikansi sebesar $0,285 > 0,05$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penugasan Pemberian Keterangan Ahli (X2) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap integritas pemerintah daerah (Y).
- Program MCP (X3) menghasilkan nilai t hitung sebesar $0,992 < 1,70329$ dan nilai signifikansi sebesar $0,330 > 0,05$, sehingga dapat

diambil kesimpulan bahwa Program MCP (X3) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap integritas pemerintah daerah (Y).

- Selanjutnya menentukan berapa persen pengaruh penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli, Program MCP, terhadap Integritas Pemerintah Daerah Tahun 2021, kita dapat melihat table berikut

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,385 ^a	,149	,054	6,50914

a. Predictors: (Constant), MCP, PKKN, AHLI

b. Dependent Variable: SPI

Jadi kita melihat table di atas, bisa dilihat bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,149 atau 14,9%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel independen yaitu penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli, dan Program MCP berkontribusi sebesar 14,9% terhadap Integritas Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya sebanyak 85,1% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian.

d) Membangun persamaan regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	56,533	14,531		3,891	,001		
	PKKN	-,559	,401	-,440	-1,396	,174	,318	3,143
	AHLI	,188	,173	,354	1,092	,285	,299	3,340
	MCP	,168	,169	,196	,992	,330	,808	1,237

a. Dependent Variable: SPI

Persamaan regresi yang dapat dibangun dalam pengujian ini adalah

$$\text{SPI} = 56,533 - 0,559\text{PKKN} + 0,188\text{AHLI} + 0,168\text{MCP}$$

BAB III KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan yaitu:

1. Penugasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP yang mencakup Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, Program MCP yang dilaksanakan KPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Integritas Pemerintah Daerah pada Tahun 2021.
2. Penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli, dan Program MCP secara bersama-sama berkontribusi sebesar 14,9% terhadap Integritas Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya sebanyak 85,1% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian.
3. Penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap integritas pemerintah daerah.
4. Penugasan Pemberian Keterangan Ahli berpengaruh positif tidak signifikan terhadap integritas pemerintah daerah.
5. Program MCP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap integritas pemerintah daerah.